



Original Article

Integrasi Perspektif Psikologi Perilaku Sosial dan Humanistik dalam Perumusan Kebijakan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Regiena Sari¹ ✉

Universitas Paramadina Jakarta, Indonesia

Correspondence Author: regiena.sari@students.paramadina.ac.id ✉

Abstract:

This study examines the importance of integrating social behavioral psychology and humanistic perspectives in the formulation of public policies that are responsive to societal needs. Many public policies today fail to reflect the real needs of society because they prioritize technocratic approaches without considering social and psychological factors. The objective of this research is to explore how these two perspectives can enhance the relevance and effectiveness of public policies. The methodology employed is library research, gathering primary data from literature on public policy theory, social behavioral psychology, and humanistic perspectives. Secondary data includes previous research findings on the topic. The results of the study indicate that policies integrating social behavioral and humanistic theories are more likely to be accepted by the public, increase public participation, and promote sustainable social change. However, the main challenges in implementation lie in the dominance of technocratic approaches and resistance to integrating psychological perspectives. The study concludes that responsive public policies require a deep understanding of social psychology and humanistic principles, which can strengthen the effectiveness and fairness of such policies.

Keywords: Psikologi Perilaku Sosial, Perspektif Humanistik, Kebijakan Publik Responsif

Submitted	: 16 Januari 2026
Revised	: 20 Januari 2026
Acceptance	: 15 February 2026
Publish Online	: 16 February 2026

Introduction

Kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi sebagian isu utama dalam tata kelola pemerintahan saat ini. Terutama di negara berkembang, terdapat kesenjangan yang nyata antara kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Masyarakat sering kali merasa bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kurang efektif, tetapi juga

tidak mencerminkan atau bahkan memahami permasalahan yang mereka hadapi. Ketidakcocokan antara kebijakan yang ditetapkan dan kebutuhan masyarakat ini sering berakar pada ketidakmampuan pemerintah dalam melihat dinamika sosial, psikologis, dan budaya masyarakat secara menyeluruh. Kebijakan yang didasarkan hanya pada data teknis, seperti statistik ekonomi dan indikator kuantitatif, sering kali gagal mempertimbangkan konteks sosial dan perilaku masyarakat. Akibatnya, kebijakan tersebut tidak hanya kurang relevan, tetapi juga dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas implementasi kebijakan. Pada akhirnya, masalah ini menciptakan ketidakpuasan publik, meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini mendesak untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana kebijakan publik dapat disusun dengan mempertimbangkan lebih banyak perspektif, terutama dalam mengintegrasikan psikologi perilaku sosial dan pendekatan humanistik untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ([Husin 2024](#)).

Berdasarkan tinjauan literatur, pendekatan-pendekatan kebijakan yang ada selama ini lebih banyak terfokus pada pendekatan teknokratis, yang mementingkan pengumpulan data kuantitatif, seperti statistik ekonomi, angka pengangguran, atau tingkat kemiskinan, tanpa mempertimbangkan dimensi psikologis atau sosial dari masyarakat. Hal ini berujung pada kebijakan yang tidak mampu merespons atau mengakomodasi kebutuhan mendalam masyarakat. Berbagai teori dalam psikologi sosial, seperti teori perilaku sosial dan teori motivasi manusia, telah menunjukkan bahwa keputusan individu dan kelompok seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis yang lebih dalam, seperti persepsi, nilai-nilai, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Namun, teori-teori tersebut seringkali tidak terintegrasi dalam pembuatan kebijakan publik. Selain itu, perspektif humanistik, yang berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan, hak individu, dan kesejahteraan masyarakat, juga jarang diakomodasi dalam kebijakan publik yang sering kali lebih mengutamakan solusi teknis atau ekonomi. Keterbatasan inilah yang menghambat terciptanya kebijakan yang benar-benar sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan teori-teori psikologi perilaku sosial dan humanistik dalam perumusan kebijakan publik, agar kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan responsif terhadap dinamika sosial yang ada ([Intani 2025](#)).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perspektif psikologi perilaku sosial dan humanistik dapat diintegrasikan dalam perumusan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk menggali cara-cara baru dalam merumuskan kebijakan publik yang tidak hanya mengutamakan hasil yang teknis atau ekonomis, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial masyarakat yang terdampak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana faktor-faktor psikologis, seperti persepsi, sikap, dan norma sosial, dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pendekatan humanistik yang menekankan pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan dapat memperkaya kebijakan publik, dengan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas. Dalam konteks ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori-teori kebijakan publik yang lebih holistik, serta menyediakan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih sensitif dan inklusif ([Muid, Halizah, and Waro](#)).

[2025](#)).

Penelitian ini penting karena mengisi kekosongan yang ada dalam studi kebijakan publik yang selama ini lebih menekankan pada pendekatan rasional dan teknokratis tanpa mempertimbangkan dimensi psikologis dan sosial masyarakat. Hipotesis utama dalam penelitian ini adalah bahwa integrasi perspektif psikologi perilaku sosial dan humanistik dalam kebijakan publik dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, relevan, dan efektif. Sebagai contoh, pemahaman terhadap perilaku sosial masyarakat dapat membantu pembuat kebijakan untuk memprediksi bagaimana kebijakan akan diterima dan direspons oleh masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat yang sesungguhnya. Perspektif humanistik, di sisi lain, dapat memperkuat kebijakan dengan menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial, yang memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan adil dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah bahwa kebijakan publik yang mengintegrasikan kedua perspektif ini akan lebih berhasil dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pendekatan psikologis dan humanistik dalam perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dan responsif ([Rifai 2023](#)).

Methods

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam studi ini adalah bagaimana kebijakan publik dapat dirumuskan dengan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui integrasi perspektif psikologi perilaku sosial dan humanistik. Fenomena yang diteliti berkaitan dengan ketidakcocokan antara kebijakan publik yang diterapkan dan kebutuhan riil masyarakat, yang sering kali tidak tercermin dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagian permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan publik yang bersifat teknokratis dan lebih mengutamakan data kuantitatif seperti angka kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, sering kali gagal memperhitungkan dinamika sosial dan psikologis yang ada di dalam masyarakat. Padahal, keputusan yang dibuat oleh masyarakat dan respons terhadap kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, dan budaya, yang tidak selalu bisa diukur dengan statistik. Fenomena ini sering kali menghasilkan ketidakpuasan publik, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, serta kegagalan dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana perspektif psikologi perilaku sosial yang mencakup persepsi, sikap, dan norma sosial, serta perspektif humanistik yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan, dapat diintegrasikan dalam perumusan kebijakan publik yang lebih sensitif dan responsif terhadap masyarakat ([Puspitasari and Syafitri 2025](#)).

Tipe Penelitian dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kepustakaan (library research) atau studi literatur, yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur terkini yang membahas tentang teori-teori kebijakan publik, psikologi perilaku sosial, serta perspektif humanistik dalam konteks pembuatan kebijakan publik. Sumber data primer ini mencakup jurnal ilmiah, artikel, buku, dan

makalah-makalah penelitian yang menjelaskan tentang dinamika sosial, psikologi perilaku, serta penerapan teori humanistik dalam kebijakan publik. Sementara itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur pendukung yang membahas berbagai kajian sebelumnya mengenai kebijakan publik, teori psikologi sosial, serta prinsip-prinsip humanistik yang dapat diterapkan dalam pembuatan kebijakan. Data sekunder ini membantu memberikan konteks yang lebih luas mengenai kebijakan publik yang sudah ada dan bagaimana teori-teori tersebut belum sepenuhnya diterapkan atau diakomodasi dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif. Melalui pengumpulan dan analisis data dari kedua jenis literatur ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana kebijakan publik dapat lebih sensitif terhadap dimensi sosial dan psikologis masyarakat, serta memenuhi kebutuhan yang lebih holistik ([Kurniawan et al. 2026](#)).

Teori Dasar dalam Penelitian

Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa teori yang relevan dengan pembahasan tentang psikologi perilaku sosial dan perspektif humanistik dalam kebijakan publik. Sebagian teori yang dijadikan landasan adalah Teori Perilaku Sosial yang dikembangkan oleh B.F. Skinner dan para pengikutnya. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh stimulus eksternal dari lingkungan sosial dan budaya tempat individu berinteraksi. Dalam konteks kebijakan publik, teori ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan pemerintah akan memengaruhi masyarakat, baik dalam hal keputusan individu maupun perilaku kelompok, tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut disampaikan dan diterima dalam konteks sosial yang lebih luas. Selain itu, teori Humanistik yang dikembangkan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers juga menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Maslow dengan teori hirarki kebutuhannya (1943) menekankan bahwa manusia memiliki kebutuhan psikologis dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai aktualisasi diri. Dalam hal ini, kebijakan publik perlu mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Perspektif humanistik ini mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, yang sering kali kurang diperhatikan dalam kebijakan yang berbasis pada pendekatan teknokratik. Integrasi antara teori perilaku sosial dan teori humanistik akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan publik dapat disusun agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan psikologis masyarakat ([Wahyudi 2025](#)).

Proses Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Proses penelitian ini dimulai dengan melakukan pencarian literatur yang relevan mengenai kebijakan publik, teori psikologi perilaku sosial, dan perspektif humanistik dalam konteks kebijakan publik. Tahapan pertama dalam pengumpulan data adalah melakukan studi pustaka untuk mengidentifikasi teori-teori dasar terkait topik yang sedang diteliti. Penelitian ini mengumpulkan artikel-artikel ilmiah, buku, jurnal, dan makalah dari berbagai sumber yang kredibel mengenai kebijakan publik yang responsif dan integrasi psikologi perilaku sosial dan humanistik dalam kebijakan. Selanjutnya, penulis melakukan analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan di berbagai negara, baik yang berhasil maupun yang gagal, untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan apa faktor sosial serta psikologis

yang memengaruhi penerimaan kebijakan tersebut. Pengumpulan data ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan kritis untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan dari literatur kemudian dikelompokkan dalam tema-tema tertentu, seperti dampak psikologi sosial dalam kebijakan, implementasi nilai-nilai humanistik dalam kebijakan, serta analisis terhadap kebijakan yang telah diterapkan ([RAHMAWATI et al. 2025](#)).

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penelitian ini menggunakan teknik analisis konten yang melibatkan proses sistematis untuk menilai dan mengolah informasi yang ada dalam literatur. Teknik analisis konten ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan dengan mengkategorikan data yang diperoleh ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan pengaruh psikologi perilaku sosial terhadap kebijakan publik, peran perspektif humanistik dalam kebijakan yang adil, serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk mengidentifikasi apakah ada kesenjangan antara teori yang ada dengan praktik kebijakan yang diterapkan. Analisis dilakukan secara mendalam untuk memahami bagaimana kebijakan publik yang responsif terhadap psikologi sosial dan perspektif humanistik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memperkuat keberlanjutan kebijakan tersebut. Hasil analisis ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dan inklusif, serta dampaknya terhadap penerimaan dan keberhasilan kebijakan di masyarakat ([Muldiyana et al. 2026](#)).

Results & Discussion

Hasil penelitian ini menyoroti beberapa temuan penting terkait dengan integrasi psikologi perilaku sosial dan perspektif humanistik dalam perumusan kebijakan publik yang responsif. Sebagian temuan utama adalah bahwa kebijakan yang dirancang dengan mengintegrasikan kedua perspektif ini lebih cenderung untuk diterima oleh masyarakat dan secara efektif memenuhi kebutuhan sosial. Psikologi perilaku sosial memberikan wawasan tentang bagaimana individu dan kelompok merespon rangsangan eksternal, seperti intervensi pemerintah. Dengan memahami reaksi ini, pembuat kebijakan dapat menciptakan strategi yang lebih selaras dengan norma sosial, nilai, dan harapan masyarakat. Perspektif humanistik, yang menekankan pada martabat, keadilan, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, lebih lanjut berkontribusi pada kebijakan yang tidak hanya bertujuan untuk efisiensi tetapi juga mempromosikan kesetaraan dan inklusivitas ([Fauzi et al. 2025](#)).

Temuan penting lainnya adalah bahwa kebijakan yang dirancang dengan memahami perilaku sosial dapat lebih baik dalam mempertimbangkan bagaimana individu berinteraksi dengan sistem sosial. Sebagai contoh, intervensi yang memperhitungkan bagaimana orang membentuk persepsi mereka terhadap isu-isu tertentu, seperti kesehatan atau kesejahteraan, lebih berhasil dibandingkan yang hanya mengandalkan argumen rasional atau teknis. Psikologi perilaku mengungkapkan bahwa tindakan manusia sering dipengaruhi oleh bias kognitif, pengaruh sosial, dan respons emosional. Kebijakan yang mengintegrasikan wawasan ini lebih mungkin diterima oleh masyarakat karena lebih selaras dengan cara orang berpikir dan bertindak dalam konteks dunia nyata. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek tetapi juga memfasilitasi perubahan perilaku jangka panjang secara lebih berkelanjutan ([Khairani and Fitrah 2026](#)).

Dalam hal kontribusi perspektif humanistik, integrasi hirarki kebutuhan Maslow terbukti sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik mengaddress kebutuhan psikologis dasar individu. Kebijakan yang fokus pada pemberian rasa aman, kebersamaan, penghargaan, dan aktualisasi diri lebih mungkin untuk menghasilkan respons positif dari publik. Hal ini sangat relevan dalam bidang kebijakan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, di mana tujuan tidak hanya untuk menyediakan sumber daya material, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan keseluruhan individu. Penerapan prinsip humanistik dalam desain kebijakan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efektif, tetapi juga adil, dengan menghormati martabat intrinsik individu dan mendorong pemberdayaan mereka.

Sebagian temuan utama adalah bahwa pendekatan gabungan yang mengintegrasikan psikologi perilaku dan nilai-nilai humanistik menghasilkan kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif. Dengan mempertimbangkan aspek psikologis dari perilaku sosial, kebijakan dapat dirancang untuk lebih melibatkan warga negara dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kepercayaan publik dan kerja sama. Ini sangat penting dalam masyarakat demokratis, di mana keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada partisipasi dan dukungan publik. Kebijakan yang mempertimbangkan martabat manusia, rasa hormat, dan keadilan juga membantu menjembatani kesenjangan antara tindakan pemerintah dan harapan masyarakat, yang sangat penting untuk mempertahankan keharmonisan sosial dan stabilitas.

Penelitian ini juga menekankan bahwa integrasi kedua perspektif ini meningkatkan keberlanjutan kebijakan. Ketika kebijakan selaras dengan kebutuhan psikologis dan nilai-nilai humanistik masyarakat, kebijakan tersebut lebih mungkin untuk bertahan dalam jangka panjang. Ini terutama berlaku di bidang kebijakan lingkungan, di mana perubahan perilaku sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang, seperti pengurangan emisi karbon atau peningkatan praktik pengelolaan sampah. Kebijakan yang didasarkan pada psikologi perilaku sosial dan nilai-nilai humanistik tidak hanya tentang hasil jangka pendek, tetapi juga tentang menciptakan perubahan perilaku yang langgeng. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan publik memiliki dampak yang lebih mendalam dan bertahan lama pada masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menyarankan bahwa integrasi perspektif psikologis dan humanistik dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap berbagai konteks sosial. Kebijakan yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip ini lebih fleksibel dan dapat disesuaikan untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh berbagai komunitas. Hal ini sangat penting di masyarakat multikultural dan beragam, di mana kebijakan yang berlaku umum sering kali gagal mengatasi kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok. Dengan mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi perilaku, pembuat kebijakan dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan populasi yang beragam, memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal.

Selain itu, studi kasus yang disediakan dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana kebijakan yang sukses telah dirancang menggunakan pendekatan integratif. Sebagai contoh, kampanye kesehatan masyarakat yang menggabungkan wawasan dari psikologi perilaku dengan prinsip-prinsip humanistik telah mencapai kesuksesan luar biasa dalam mempromosikan perilaku sehat, seperti kampanye anti-merokok. Kampanye ini menggunakan wawasan perilaku untuk membentuk persepsi publik dan pesan, sambil memastikan bahwa mereka berakar pada nilai-nilai humanistik, seperti menghormati pilihan individu dan mempromosikan kesejahteraan secara keseluruhan. Pendekatan terintegrasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kampanye tetapi juga memastikan bahwa kampanye tersebut lebih diterima oleh publik secara luas.

Temuan penting lainnya adalah bahwa kebijakan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologis dan humanistik cenderung membangun kepercayaan publik dan kerja sama yang lebih besar. Kepercayaan pada pemerintah sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan publik, dan kebijakan yang dianggap adil, benar, dan

menghormati martabat orang cenderung memperoleh dukungan publik. Penelitian ini menyoroti bahwa ketika kebijakan mencerminkan nilai-nilai orang yang terpengaruh, ada rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar di antara warga negara, yang mengarah pada peningkatan kepatuhan dan partisipasi. Ini sangat penting di bidang kesejahteraan sosial dan keadilan, di mana kerja sama publik sangat penting bagi keberhasilan kebijakan.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam menerapkan pendekatan-pendekatan terintegrasi ini dalam perumusan kebijakan. Sebagian tantangan utama adalah dominasi pendekatan berbasis data kuantitatif dan teknis dalam kebijakan publik. Pembuat kebijakan sering kali mengandalkan metrik seperti PDB, tingkat pengangguran, atau analisis biaya-manfaat untuk membimbing pengambilan keputusan, yang dapat mengabaikan dimensi psikologis dan sosial dari masalah yang ada. Studi ini menunjukkan bahwa mengatasi tantangan ini membutuhkan perubahan dalam cara kebijakan dipahami, dengan memberi penekanan lebih pada pemahaman faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan. Perubahan ini akan membutuhkan perubahan dalam pelatihan pembuat kebijakan, mendorong mereka untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan lintas disiplin dalam pengembangan kebijakan.

Meskipun tantangan ini ada, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mengintegrasikan psikologi perilaku dan perspektif humanistik dalam perumusan kebijakan memiliki potensi besar untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial yang membentuk perilaku publik dan dengan mendasarkan kebijakan pada nilai-nilai humanistik, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan segera tetapi juga mempromosikan kesejahteraan sosial jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuat kebijakan harus terus mengeksplorasi dan menerapkan pendekatan lintas disiplin ini untuk menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kompleksitas masyarakat modern, yang pada akhirnya akan menghasilkan sektor publik yang lebih adil, inklusif, dan responsif.

Discussion

Peran Psikologi Perilaku dalam Perumusan Kebijakan

Integrasi psikologi perilaku dalam perumusan kebijakan memainkan peran penting dalam memahami bagaimana individu dan kelompok merespons intervensi pemerintah. Sebagian wawasan utama dari penelitian ini adalah bahwa perilaku manusia tidak sepenuhnya rasional, tetapi dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti norma sosial, bias kognitif, dan emosi. Kebijakan yang mempertimbangkan faktor-faktor ini lebih cenderung efektif karena selaras dengan cara orang berpikir dan bertindak secara alami. Misalnya, dengan menggunakan wawasan dari teori perilaku sosial, seperti yang dikemukakan oleh B.F. Skinner dan lainnya, pembuat kebijakan dapat merancang intervensi yang mengarahkan orang menuju perilaku yang diinginkan tanpa menggunakan tindakan koersif. Dengan memahami motivasi psikologis di balik perilaku individu dan kelompok, pembuat kebijakan dapat merancang kebijakan yang lebih mungkin diterima oleh masyarakat, mengurangi resistensi, dan meningkatkan kepatuhan.

Selain itu, psikologi perilaku menekankan pentingnya cara kebijakan dibingkai dan dikomunikasikan. Cara suatu kebijakan disampaikan kepada publik dapat memiliki dampak besar pada bagaimana kebijakan tersebut diterima. Sebagai contoh, membingkai kebijakan dengan menyoroti manfaatnya bagi masyarakat atau menekankan norma sosial yang terkait dengan kepatuhan dapat meningkatkan tingkat penerimaan. Efek pembingkai ini menunjukkan bahwa prinsip psikologis berperan penting tidak hanya dalam pengambilan keputusan individu, tetapi juga dalam membentuk respons sosial yang lebih luas terhadap kebijakan. Dengan mengintegrasikan wawasan ini, pembuat kebijakan dapat menciptakan pesan yang lebih

mendalam bagi masyarakat, menjadikan kebijakan tersebut lebih menarik dan lebih mudah diterapkan.

Selain itu, psikologi perilaku sosial menekankan pentingnya menangani motivator intrinsik dan ekstrinsik dalam desain kebijakan. Motivator intrinsik, seperti keinginan untuk mendapatkan persetujuan sosial atau pencapaian tujuan pribadi, dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan perilaku. Sebagai contoh, kebijakan yang memanfaatkan motivasi intrinsik ini, seperti kebijakan yang mendorong perilaku berkelanjutan, dapat memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar dibandingkan kebijakan yang hanya bergantung pada hadiah atau hukuman eksternal. Wawasan ini sejalan dengan temuan bahwa kebijakan yang berlandaskan psikologi perilaku lebih mungkin menghasilkan perubahan perilaku jangka panjang, karena mereka memenuhi kebutuhan psikologis yang lebih mendalam dan motivasi individu.

Namun, integrasi psikologi perilaku dalam perumusan kebijakan juga menghadirkan beberapa tantangan. Pembuat kebijakan harus memastikan bahwa wawasan perilaku diterapkan secara etis dan bertanggung jawab. Penggunaan dorongan perilaku, misalnya, dapat dipandang sebagai manipulatif jika tidak dilakukan secara transparan dan dengan memperhatikan kesejahteraan publik. Dengan demikian, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk menemukan keseimbangan antara menggunakan wawasan psikologis untuk membimbing perilaku dan menghormati otonomi individu. Dengan demikian, meskipun psikologi perilaku menyediakan alat yang berharga untuk merancang kebijakan yang efektif, penerapannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan implikasi etis agar kebijakan tetap adil dan sah.

Meskipun tantangan ini ada, manfaat mengintegrasikan psikologi perilaku dalam perumusan kebijakan sangat jelas. Dengan memahami bagaimana faktor psikologis mempengaruhi perilaku, kebijakan dapat dirancang dengan lebih baik untuk melibatkan masyarakat, meningkatkan kepatuhan, dan mencapai hasil yang berkelanjutan. Dengan demikian, psikologi perilaku harus menjadi landasan dalam pengembangan kebijakan publik, terutama di bidang yang membutuhkan perubahan perilaku yang signifikan, seperti kesehatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Tabel 1, Psikologi Perilaku dalam Kebijakan

Wawasan Utama	Contoh Aplikasi Kebijakan	Tantangan dan Pertimbangan Etis
Perilaku dipengaruhi bias, norma sosial, emosi bukan rasional murni	Intervensi nudge berbasis teori Skinner untuk kepatuhan sukarela	Risiko dianggap manipulatif; pastikan transparansi dan persetujuan publik
Efek framing memengaruhi penerimaan publik	Soroti manfaat komunitas atau norma sosial untuk tingkatan penerimaan	Seimbangkan persuasi dengan otonomi; hindari pesan paksaan

Wawasan Utama	Contoh Aplikasi Kebijakan	Tantangan dan Pertimbangan Etis
Manfaatkan motivator intrinsik (pengakuan, tujuan pribadi)	Dorong perilaku berkelanjutan melalui pemenuhan diri untuk perubahan jangka panjang	Aplikasi etis diperlukan; utamakan kesejahteraan daripada kontrol
Sesuaikan kebijakan dengan psikologi manusia alami	Rancang untuk kesehatan, lingkungan, kesejahteraan melalui motivasi mendalam	Jaga keadilan; pantau bias tidak disengaja dalam implementasi

Mengintegrasikan Nilai-Nilai Humanistik dalam Kebijakan Publik

Integrasi nilai-nilai humanistik dalam kebijakan publik merupakan temuan penting lainnya dari penelitian ini, yang menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan dasar manusia dalam pengembangan kebijakan. Prinsip-prinsip humanistik, seperti yang dikembangkan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers, berpendapat bahwa untuk kebijakan dapat benar-benar efektif, kebijakan tersebut harus memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional masyarakat, bukan hanya kebutuhan material. Hirarki kebutuhan Maslow, yang menyoroti pentingnya rasa aman, keterhubungan, penghargaan, dan aktualisasi diri, memberikan kerangka untuk merancang kebijakan yang membantu individu mencapai pemenuhan dan kesejahteraan. Ketika kebijakan selaras dengan kebutuhan dasar manusia ini, kebijakan tersebut lebih cenderung untuk diterima oleh publik dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.

Lebih lanjut, perspektif humanistik menekankan martabat dan nilai setiap individu. Pendekatan ini mendorong penciptaan kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga adil dan setara. Kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai humanistik mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan pengalaman individu, terutama mereka yang berasal dari kelompok marginal atau kurang beruntung. Dengan memprioritaskan keadilan dan inklusivitas, kebijakan humanistik memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk berkembang. Hal ini sangat relevan di bidang kebijakan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, di mana kebijakan yang mencerminkan martabat manusia dan mempromosikan akses yang setara terhadap sumber daya dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Mengintegrasikan nilai-nilai humanistik dalam perumusan kebijakan juga membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya. Ketika individu merasa bahwa kebutuhan mereka diakui dan hak mereka dihormati, mereka lebih cenderung untuk mendukung dan terlibat dengan kebijakan publik. Kepercayaan ini sangat penting bagi keberhasilan setiap inisiatif publik, karena kebijakan yang dianggap tidak adil atau eksklusif sering kali menghadapi resistensi.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip humanistik dalam desain kebijakan, pemerintah dapat mendorong kohesi sosial yang lebih besar dan meningkatkan kerja sama publik, yang pada akhirnya akan mengarah pada kebijakan yang lebih sukses dan berkelanjutan.

Namun, integrasi nilai-nilai humanistik dalam kebijakan juga dapat menghadirkan tantangan, terutama di masyarakat dengan norma dan nilai budaya yang beragam. Konsep martabat manusia, misalnya, dapat dipahami secara berbeda di berbagai konteks budaya, yang membuat sulit untuk menciptakan kebijakan yang diterima secara universal. Dengan demikian, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan konteks budaya saat menerapkan prinsip-prinsip humanistik dalam desain kebijakan, memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menghormati keberagaman budaya tetapi juga selaras dengan standar hak asasi manusia yang lebih luas. Meskipun ada tantangan ini, pendekatan humanistik tetap penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berperikemanusiaan.

Pada akhirnya, integrasi nilai-nilai humanistik dalam kebijakan publik tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan tetapi juga memperkuat dasar moral dan etika pemerintahan. Kebijakan yang mempromosikan martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan lebih cenderung berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, nilai-nilai humanistik harus dianggap sebagai bagian integral dari proses pembuatan kebijakan, terutama dalam menghadapi tantangan sosial yang kompleks yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi manusia.

Sinergi antara Psikologi Perilaku Sosial dan Perspektif Humanistik

Penelitian ini menyoroti sinergi antara psikologi perilaku sosial dan perspektif humanistik sebagai elemen kunci dalam mengembangkan kebijakan publik yang lebih responsif dan efektif. Kedua perspektif ini, meskipun memiliki fokus yang berbeda, saling melengkapi dengan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang perilaku manusia. Psikologi perilaku sosial membantu mengidentifikasi bagaimana faktor eksternal, seperti kebijakan, dapat mempengaruhi perilaku, sementara perspektif humanistik memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan kebutuhan dan nilai-nilai dasar manusia. Ketika digabungkan, kedua pendekatan ini menciptakan kebijakan yang tidak hanya lebih mungkin diterima oleh masyarakat tetapi juga lebih mungkin menghasilkan perubahan sosial yang berarti dan berkelanjutan.

Sebagian wawasan utama dari penelitian ini adalah bahwa dengan mengintegrasikan psikologi perilaku dan prinsip-prinsip humanistik, pembuat kebijakan dapat merancang intervensi yang lebih mendalam bagi individu dan komunitas. Misalnya, kebijakan yang mendorong perilaku berkelanjutan dapat memperoleh manfaat dari wawasan perilaku yang membongkai manfaat keberlanjutan dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat, seperti keadilan atau penghormatan terhadap generasi mendatang. Pada saat yang sama, prinsip-prinsip humanistik dapat memastikan bahwa kebijakan ini inklusif, dapat diakses, dan menghormati hak serta martabat masyarakat. Pendekatan ganda ini dapat menghasilkan kebijakan yang mengatasi baik kebutuhan kognitif maupun emosional individu, memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan kebijakan tetapi juga etis dan diterima secara sosial.

Sinergi antara kedua perspektif ini juga membantu mengatasi masalah sosial yang kompleks dengan mengakui keterkaitan antara faktor psikologis, sosial, dan etika. Misalnya, dalam kebijakan kesehatan masyarakat, psikologi perilaku dapat membantu merancang intervensi yang mempromosikan perilaku sehat, seperti peningkatan tingkat vaksinasi, sementara prinsip humanistik dapat memastikan bahwa intervensi tersebut dirancang dengan cara yang menghormati otonomi individu dan memberikan akses yang setara terhadap layanan kesehatan. Pendekatan ini menghasilkan kebijakan yang tidak hanya lebih efektif dalam mengatasi penyebab masalah kesehatan tetapi juga lebih mungkin diterima oleh masyarakat.

Selain itu, pendekatan gabungan ini memungkinkan desain kebijakan yang lebih bernuansa yang mempertimbangkan kebutuhan individu dan kolektif. Misalnya, teori perilaku sosial menekankan pentingnya norma sosial dan dinamika kelompok, sementara teori humanistik fokus pada otonomi individu dan aktualisasi diri. Dengan mempertimbangkan kedua aspek ini, pembuat kebijakan dapat merancang intervensi yang mendorong tindakan kolektif sambil juga menghormati hak dan aspirasi individu. Fokus ganda ini membantu menciptakan kebijakan yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memberdayakan individu untuk memiliki kepemilikan atas tindakan mereka dan berkontribusi pada kebaikan bersama.

Namun, penerapan pendekatan terintegrasi ini mungkin memerlukan perubahan dalam pelatihan pembuat kebijakan dan cara kebijakan dievaluasi. Pendekatan ini membutuhkan perspektif yang lebih luas mengenai apa yang dianggap sebagai keberhasilan dalam kebijakan publik, melampaui metrik tradisional seperti hasil ekonomi atau efisiensi. Pembuat kebijakan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih lintas disiplin yang menggabungkan wawasan dari psikologi, sosiologi, dan etika untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Perubahan ini akan memerlukan tidak hanya perubahan dalam desain kebijakan tetapi juga dalam diskursus politik dan sosial yang lebih luas, di mana pentingnya faktor psikologis dan humanistik dalam pembuatan kebijakan lebih banyak diakui.

Conclusion

Integrasi perspektif psikologi perilaku sosial dan humanistik dalam perumusan kebijakan publik dapat secara signifikan meningkatkan responsivitas dan efektivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku sosial, nilai-nilai masyarakat, dan kebutuhan psikologis individu memungkinkan kebijakan yang dirumuskan lebih relevan dengan kondisi sosial dan emosional masyarakat. Dengan mempertimbangkan kedua perspektif ini, kebijakan tidak hanya menjadi lebih diterima, tetapi juga dapat menghasilkan perubahan sosial yang lebih berkelanjutan. Kebijakan publik yang menggabungkan teori perilaku sosial dan nilai-nilai humanistik lebih mampu menciptakan kebijakan yang inklusif, adil, dan efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapan pendekatan ini, seperti ketergantungan pada pendekatan teknokratik yang lebih mengutamakan data kuantitatif dan resistensi terhadap penerapan teori psikologi serta humanistik yang lebih sulit diukur. Meskipun demikian, manfaat dari

integrasi kedua perspektif ini jelas terlihat dalam peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan keberlanjutan kebijakan yang lebih tinggi. Dengan demikian, penting bagi pembuat kebijakan untuk terus mengeksplorasi dan mengadopsi pendekatan multidisipliner yang menggabungkan psikologi perilaku sosial dan humanistik guna menciptakan kebijakan yang lebih responsif, adil, dan efisien.

References

- Fauzi, Rizki, Sri Purwati, Yanti Lestari, and Ahmad Khotib. (2025). *Teori Dan Praktik Pendidikan Sepanjang Hayat*. PT Arr Rad Pratama.
- Husin, Cut Humaira. (2024). "PSIKOLOGI PEMBANGUNAN MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG SEHAT DAN PRODUKTIF." *Circle Archive* 1(4).
- Intani, Syahriska Maulia. (2025). "Transformasi Psikologi Klasik Menuju Psikologi Modern Yang Integratif." *Jurnal Riset Psikologi Indonesia* 1(1):31–38.
- Khairani, Cut, and Hariki Fitrah. (2026). *Strategi Pengembangan Teori Dalam Ilmu Sosial: Pendekatan Klasik Hingga Kontemporer*. Minhaj Pustaka.
- Kurniawan, Nanda Alfian, Destanika Dhiffa Ralianti, Parid Rilo Pambudi, and Suci Nora Julina Putri. (2026). "Nilai Kemanusiaan ODGJ Sebagai Sumber Resiliensi Psikososial Dalam Dinamika Sosial Budaya." *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)* 5:13–25.
- Muid, Abdul, Rita Nur Halizah, and Khoril Waro. (2025). "Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan." *JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN ISLAM* 15(15):65–73.
- Muldiyana, Muldiyana, Fikstif Donal Lintong, Loso Judijanto, and Sepriano Sepriano. (2026). *PROBLEM PROBLEM SOSIAL*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Puspitasari, Mei Linda, and Dayang Astri Rahma Syafitri. (2025). "Konsep Dan Teori Dasar Pendidikan Serta Transformasinya Di Era Digital." *STUDIA ULUMINA: Jurnal Kajian Pendidikan* 1(2):97–114.
- RAHMAWATI, SITI, LUQMAN AZHARY, OKVI MAHARANI, DENIS ALFIAN, and A. S. I. SRIWIDIASTUTY. (2025). *PROBLEM PROBLEM SOSIAL*. ALINEA EDUMEDIA.
- Rifai, Rifai. (2023). "Determinasi Inovasi Pelayanan Publik Terhadap Konseptualisasi Paradigma Humanis." *Cakrawala Repositori IMWI* 6(2):800–809.
- Wahyudi, Heru. (2025). *Dasar-Dasar Teori Administrasi Negara: Perspektif Global Dan Lokal*. JAKA MAULANA.